





**Z. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<b>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota.</li> <li>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>    b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kota.</li> <li>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota.</li> <li>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota.</li> <li>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.</li> <li>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di pedesaan.</li> <li>2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</li> <li>b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</li> <li>3.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</li> <li>b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</li> <li>4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</li> </ol>
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li style="padding-left: 20px;">b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</li> <li style="padding-left: 20px;">c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida</li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</li> <li>5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota.</li> <li style="padding-left: 20px;">b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</li> <li style="padding-left: 20px;">c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</li> <li style="padding-left: 20px;">d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li style="padding-left: 20px;">e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/perajin alat dan mesin pertanian.</p>
	<p>6. Benih Tanaman</p>	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota.</p> <p>2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota.</p> <p>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>e. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</p> <p>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>j. Pengembangan sistem informasi pembenihan.</p> <p>6.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</p> <p>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</p> <p>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.</p>
	8. Perlindungan Tanaman	<p>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah kota.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota.</p> <p>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.</p> <p>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.</p> <p>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.</li> </ul>
	9. Perizinan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> <li>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> </ul>
	10. Teknis Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> </ul>
	11. Pembinaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> <li>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.</li> <li>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.</p>
	13. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p>
	14. Sarana Usaha	1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota.</p>
	<p>15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p> <p>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.</p>
<p><b>2. Perkebunan</b></p>	<p>1. Lahan Perkebunan</p>	<p>1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota.</p> <p>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota.</p> <p>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota.</p> <p>2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kota.</p> <p>b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kota.</p> <p>c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kota.</p> <p>d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kota.</p> <p>e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kota.</p> <p>3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<p>1. a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p> <p>2. a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.</p>
	3. Pupuk	<p>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>

